

PENDIDIKAN ILMU SOSIAL UNTUK MEMPERTEGUH KESATUAN BANGSA DALAM ERA OTONOMI DAERAH¹

Pendahuluan.

Peristiwa terakhir di negeri ini membuat kita terperangah. Sesudah lebih dari lima puluh tahun merdeka, rasa kesatuan bangsa menjadi rapuh, walaupun bibit persaudaraan antar suku sudah dimiliki sebelum Indonesia merdeka. Peristiwa kerusuhan rasial yang berbau sara yang terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku serta beberapa daerah lainnya di Indonesia dan juga kecenderungan otonomi atau memisahkan diri yang menjurus kepada hilangnya rasa kesatuan sebagai suatu bangsa menyebabkan kita bertanya-tanya, apa yang salah? Bukan saja hubungan antar suku bangsa yang mulai kendur, dalam suku yang sama pun perbedaan mulai dicari-cari agar dapat memisahkan diri dengan dalih pembangunan daerah.

Walaupun faktor penyebabnya mungkin banyak, seperti faktor ekonomi dan rasa ketidakadilan lainnya, sebagai orang yang bergerak dalam bidang ilmu sosial dan pendidikan, kita perlu mempertanyakan dilemma ini secara serius. Apakah ahli ilmu sosial kita tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian mereka untuk memperkokoh persatuan bangsa? Apakah pendidikan kita kurang berhasil atau telah gagal menunaikan tugasnya, membina anak menjadi warganegara yang baik, warganegara yang memiliki rasa persatuan kebangsaan? Khususnya seberapa jauh pendidikan ilmu sosial/ pendidikan ilmu pengetahuan sosial di lembaga pendidikan kita telah berperan dalam pembentukan national and character building? Atau jika pertanyaannya dibalik, apakah yang mungkin disumbangkan oleh pendidikan dan pendidikan ilmu sosial bagi kesatuan bangsa?

Makalah ini khusus akan melihat bagaimana pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial/Ilmu Sosial selama ini dijalankan, dan perubahan apa yang mungkin diusulkan dalam memperbaiki kinerjanya sehingga dapat lebih memperkokoh rasa persatuan bangsa Indonesia dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini menjadi sangat penting, karena dengan berkembangnya otonomi daerah dan daerah diharapkan akan mengambil tanggung jawabnya dalam bidang pendidikan, perlu dicari jalan sehingga otonomi daerah tidak menjadi unsur baru penyebab merenggangnya rasa persatuan. Gejala ke arah itu telah kelihatan dalam masyarakat, misalnya jalan pikiran yang menyatakan asal "Putra Asli

¹ Disampaikan oleh Drs. Azmi, MA, Ph.D. dalam Simposium International II Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru di Padang tanggal 18-21 Juli 2001

Daerah” dalam pengisian jabatan gubernur dan bupati, keinginan yang berlebihan untuk memasukkan adat istiadat daerah dalam kurikulum, yang kalau tidak terkontrol dengan baik akan membangkitkan rasa perpecahan yang sulit diatasi.

Di samping itu, berkembangnya lembaga pendidikan dari Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi di daerah pada satu sisi dapat di lihat sebagai suatu perkembangan yang positif, tetapi di sisi lain, perkembangan ini akan merugikan bagi pemupukan rasa kebangsaan. Sejarah menunjukkan bahwa lahirnya Sumpah Pemuda, timbul dan berkembangnya Pergerakan Nasional dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di pelopori oleh para pemuda yang pada waktu itu sama-sama sekolah di Batavia dan Bandung yang sudah saling mengenal, seperti Moh. Yamin, Arnold Mononutu, Latuharharry, Sukarno, Hatta, Lumban Tobing, sekedar menyebut beberapa nama. Ini berbeda dengan para pemuda yang berada di daerah yang mendirikan organisasi kedaerahan, seperti di Padang didirikan Yong Sumatranen Bond dan Dr. Wahidin di Surabaya mendirikan Budi Utomo yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan untuk kesejahteraan orang Jawa. Apa yang kita lihat sekarang adalah kurangnya kontak pribadi antara generasi muda antar provinsi dan antar suku yang kemungkinan besar menyebabkan kurangnya rasa empati di antara mereka. Ada kecendrungan bahwa sekolah di daerah terutama diisi atau diperuntukkan bagi putera daerah, dan terasa aneh kalau ada universitas di daerah yang diisi oleh orang dari luar daerah. Kita perlu meneliti apakah mungkin juga bahwa lahirnya gerakan separatis dan kedaerahan yang menonjol saat ini dipelopori oleh orang-orang yang kurang mempunyai kontak dengan luar daerahnya atau karena selama ini tidak mendapat kesempatan, lalu menghasut masyarakat yang memang tidak mengenal daerah selain dari daerahnya sendiri. Di Amerika Serikat dan negara Barat lainnya otonomi pendidikan yang luas tidak masalah karena tingginya mobilitas penduduk, adanya keterbukaan dan kemampuan ekonomi mereka yang tinggi.

Pendidikan Ilmu Sosial dalam sistem persekolahan Indonesia.

Sejak awal sekolah-sekolah di Indonesia telah memasukkan Ilmu Pengetahuan Sosial (social studies) ke dalam kurikulumnya, mulai dari TK sampai ke Perguruan Tinggi. Di sekolah ilmu sosial diberikan dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dirumuskan sebagai Ilmu Sosial (Sosial Sciences) yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan, sedangkan Ilmu Sosial sebagai ilmu disajikan di Perguruan Tinggi. Di Sekolah Dasar dan SLTP IPS mencakup Sejarah, Geografi dan PMP, ditambah dengan pelajaran

Ekonomi, Sosiologi dan Antropologi di SMU. Di SD mata pelajaran Sejarah dan geografi diberikan secara terpadu, sedangkan di SLTP dan SMU diberikan secara terpisah. Istilah IPS sebagai bidang studi yang mencakup mata pelajaran-mata pelajaran di atas baru diperkenalkan dalam kurikulum 1975. Di samping itu, pada awal tahun tujuh puluhan dalam rangka memahami dan mengurangi eksese pembangunan, diperkenalkan pula Ilmu Sosial Dasar di Perguruan Tinggi, materinya disusun berdasarkan topik-topik yang relevan bagi pembangunan.

Tujuan IPS, sebagaimana tujuan umum pendidikan, adalah mendidik anak menjadi warganegara yang baik. Pemahaman mengenai warganegara yang baik itu bervariasi. Fenton (1967:1) melihat bahwa di Amerika ada tiga konsepsi umum mengenai tujuan IPS: “social studies prepare children to be good citizens; social studies teach children how to think; social studies pass on cultural heritage”. Dalam bentuk lain dikemukakannya bahwa tujuan IPS adalah “the development of inquiry skills (sometimes called critical thinking), the development of attitudes and values and the acquisition of knowledge”.

Di Indonesia sebagaimana terlihat dari kurikulum-kurikulum yang ada, tujuan IPS tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan di atas. Dalam buram 04 rencana kurikulum Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar yang rencananya akan diterbitkan tahun 2001, dicantumkan bahwa tujuan Pengetahuan sosial adalah untuk mengembangkan pengetahuan, nilai dan sikap serta ketrampilan sosial yang berguna bagi dirinya, mengembangkan pemahaman tentang pertumbuhan masyarakat Indonesia masa lampau hingga kini sehingga siswa bangga sebagai bangsa Indonesia.

Namun dalam kenyataannya, yang terjadi selama ini di sekolah, pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang terutama berupa informasi yang ada hubungannya dengan manusia dalam kehidupannya, terutama kehidupan sosial dan hubungannya dengan lingkungan alamnya. Hal ini terlihat jelas dalam penyusunan topik-topik yang diutamakan pada fakta dan informasi yang perlu diketahui siswa. Pengamatan langsung ke dalam kelas juga menunjukkan hal ini. Keadaan ini diperparah lagi dengan ujian yang kembali menekankan pada penguasaan fakta dan informasi atau kesimpulan-kesimpulan yang sudah dibuat penulis buku. Pelajaran IPS menjadi tidak lebih dari sekadar recalling of knowledge, menghafal dan mengingat, dan tidak melatih kemampuan berfikir kritis siswa. Tidaklah mengherankan jika kemudian mata pelajaran IPS menjadi tidak disukai siswa dan salah satu sebab mengapa siswa berusaha menghindari memasuki jurusan IPS.

Karena tekanan (emphasis) dalam pelajaran IPS adalah pemberian informasi, maka proses pembelajaran terutama mempergunakan pendekatan penjajian atau expository approach, guru menjaji melalui ceramah, siswa mendengar dan mencatat. Jika ada tanya jawab dengan siswa, maka guru menjawab pertanyaan siswa dengan panjang lebar, untuk kemudian ditutup dengan pertanyaan: sudah faham?, atau siapa lagi yang belum mengerti? Siswa jarang diajak untuk mencoba membicarakan masalah-masalah sosial yang aktual di lapangan, mereka tidak dibiasakan untuk menerima sesuatu yang berbeda, mau mengertik dan terbuka untuk dikritik. Mereka diajar dengan satu kebenaran. Kecendrungan ini berlanjut dengan kegiatan penerbitan buku teks, satu-satunya sumber informasi, dan siswa dengan rekomendasi pejabat di Kanwil Diknas “dipaksa membeli buku teks.” Sumber informasi lain, seperti pengamatan langsung ke lapangan menjadi tidak penting, sehingga membuat pelajaran IPS menjadi terlepas dari keadaan nyata di lapangan. Walaupun guru mengetahui cara pembelajaran yang lain, seperti diskusi, kunjungan lapangan, dan cara siswa belajar aktif, dalam kelas hal itu jarang terjadi, dan kalau itupun terjadi, diskusi hanya mengenai informasi yang diperoleh.

Mata pelajaran khusus disediakan untuk membina rasa kebangsaan yakni Pendidikan Moral Pancasila. Mata pelajaran ini lebih merupakan indoktrinasi mengenai ideologi negara yang tidak dapat dibantah dan harus diterima sebagaimana adanya. Disamping di sekolah diadakan pula penataran-penataran untuk itu. Ternyata hal itu tidak berhasil mempererat persatuan.

Dengan pendekatan yang demikian, jelas kemampuan lain di luar memperoleh pengetahuan (knowledge) secara sempit tidak tercapai. Kemampuan berfikir kritis dan melakukan inkuiri terhadap masalah sosial dan memecahkan masalah sosial tentu tidak akan berkembang dengan menyuruh siswa menghafal informasi untuk kemudian ditanya pada waktu ujian, termasuk pada waktu Ebtanas dan UMPTN. Demikian pula cara ini tentu tidak akan dapat menumbuhkan nilai dan sikap yang diperlukan dalam belajar IPS, seperti memupuk kerjasama, bekerja serius dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Proses pembelajaran hanyalah memberi siswa informasi pengetahuan sebanyak-banyaknya, accumulated knowledge, sehingga ada keinginan agar semua masalah secara faktual mau dimasukkan dalam kurikulum secara eksplisit sebagai mata pelajaran terpisah, seperti pendidikan lingkungan hidup, pendidikan seks, dan seterusnya. Pertanyaan kita adalah, berapa besar otak anak untuk mampu mengumpulkan semua informasi itu, dan apa semua informasi itu berguna bagi kehidupan secara langsung. Misalnya apa gunanya saya

tahu bahwa Novaya Zemlya terletak di Kutub Utara sedangkan saya sendiri mungkin tidak akan berhubungan dengan kota itu atau pergi ke sana?

Usaha ke arah perbaikan kurikulum IPS sebenarnya telah mulai kelihatan pada awal merencanakan kurikulum 1975. Pada waktu itu sudah mulai diperkenalkan istilah inquiry approach, problem solving, structure of knowledge dan kurikulum spiral, tapi ide itu hilang pada waktu menetapkan garis besar program pengajaran (GBPP) yang kembali menetapkan topik-topik pelajaran yang berdasar fakta dan informasi, bukan berdasar tema atau konsep-konsep dasar IPS. Walaupun di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mahasiswa diperkenalkan dengan pendekatan pembelajaran baru, di lapangan mereka harus mengikuti kurikulum yang berlaku. Dengan demikian pembaharuan yang dilakukan di LPTK, termasuk penataran dosennya menjadi mubazir, mereka kembali ke cara lama, dan seperti kata John I. Goodlad (Silberman:1970:158) dalam mengomentari pendidikan di Amerika: "that things are much the same as they had been twenty years ago, and in some respects not as good as they were forty years ago". Tapi kalau pernyataan yang sama kita katakan sendiri untuk pendidikan di Indonesia, ada orang yang akan menolaknya.

Langkah Perubahan

Walaupun, seperti ditulis oleh Fenton (1967:10), "the social studies class alone cannot reshape the entire society", sesuatu harus dibuat agar bidang studi ini berguna bagi pribadi dan masyarakat yang mengirimkan anaknya ke sekolah. Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu mendapat perhatian.

Perbaikan kurikulum dalam arti yang luas adalah kunci dari perubahan pendidikan karena kurikulum dalam pengertian yang luas mencakup tujuan pembelajaran, rencana kegiatan pembelajaran, cara mengelola proses belajar mengajar dan evaluasi belajar. Semua unsur ini akan saling berkaitan, perbaikan harus dimulai dengan menilai dan memperbaiki keseluruhan unsur ini.

Walaupun tujuan bidang studi IPS pada saat ini secara implisit atau eksplisit sudah menyebut pemerolehan ilmu pengetahuan, kemampuan untuk berfikir kritis serta pembentukan nilai dan sikap, rasanya perlu penegasan tujuan itu secara eksplisit dan dapat dijabarkan dalam setiap kegiatan belajar. Apa yang kita lihat dari kurikulum yang lalu adalah bahwa tujuan menjadi terfokus pada usaha memperoleh pengetahuan dengan kata-kata kunci siswa dapat mengetahui, memahami, menjelaskan, dan menghayati sesuatu.

Katakunci-katakunci baru perlu dimasukkan misalnya siswa dapat memilih dengan alasan yang rasional, memecahkan masalah secara benar, memperlihatkan sikap yang benar, menunjukkan rasa empati atau simpati pada suatu keadaan dan seterusnya. Dengan ini diharapkan siswa dapat menambah kemampuan berfikir kritis mereka, memecahkan masalah yang dihadapi, baik masalah contoh dalam pembelajaran, maupun masalah nyata yang nanti akan dihadapi dalam masyarakat.

Perubahan tujuan ini mengharuskan pemilihan bahan pelajaran tidak lagi menekankan pada topik-topik berupa fakta atau informasi tetapi harus dipilih dari konsep dasar dan generalisasi dalam bidang studi IPS. Guru, atau penyusun kurikulum perlu mencari konsep-konsep dasar, generalisasi dan tema-tema yang merupakan abstraksi fakta dan informasi yang diolah dengan mempergunakan cara berfikir kritis yang akan dipergunakan sebagai sentra kegiatan PBM. Dengan demikian kegiatan belajar bukan lagi dituntun oleh topik-topik seperti perang kemerdekaan, hukum permintaan dan penawaran, sifat-sifat atau karakter orang primitif, tetapi sekitar interdependensi, bhinneka tunggal ika, tantangan dan jawaban, penindasan dan pembebasan dan seterusnya.

Karena konsep-konsep ini bersifat universal dan berlaku dimana saja dan kapan saja, dalam bentuk besar atau kecil, maka kurikulum dapat disusun secara spiral, lingkungan yang makin lama makin meluas, dan esensi yang makin lama makin mendalam. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Jerome S. Bruner ((1963: 33): “any idea can be represented honestly and usefully in the thought forms of children of school age, and that these first representations can later be made more powerful and precise the more easily by virtue of this early learning.”. Sesuai dengan teori perkembangan intelek dari Jean Piaget, proses pembelajaran harus dimulai dari kenyataan kepada hal yang abstrak. Oleh sebab itu, sebagai contoh, siswa TK diminta mengamati keluarga di rumahnya, melihat hubungan satu sama lain dan fungsi mereka masing-masing, dalam rangka memperkenalkan kepada mereka konsep interdependensi dalam kehidupan. Di SD siswa disuruh mengamati kenyataan yang menunjukkan saling ketergantungan dalam lingkungan yang lebih luas, misalnya RT dan RW, seterusnya di SMU ketergantungan satu sama lain dalam negara, bahkan dunia. Mereka tentu saja dapat pula mengamati diri sendiri, bagaimana untuk makan mereka perlu ibu, untuk ke sekolah perlu sopir. Mereka dapat pula diberi pengalaman saling ketergantungan, misalnya dalam mencari informasi bagi proyek kelas mereka, sehingga dengan demikian mereka merasakan betul bahwa untuk hidup kita saling membutuhkan. Konsep-konsep ini kemudian didalami dan diperluas dalam mata pelajaran

yang berbeda dalam bidang studi IPS, yakni sejarah, geografi, ekonomi, antropologi dan sosiologi. Untuk itu, para ahli ilmu sosial dan ahli pendidikan diharapkan dapat memilih konsep, generalisasi atau tema apa yang perlu didiskusikan di sekolah untuk mengganti topik-topik mata pelajaran selama ini.

Perubahan ini diharapkan, selanjutnya akan membawa dampak pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak lagi mengutamakan pada *expository approach* berupa ceramah oleh guru, cara berfikir deduktif, tapi berubah dan dilengkapi dengan cara berfikir induktif, menggunakan *inquiry approach* berupa kegiatan mencari sendiri informasi langsung di lapangan atau sumber lainnya oleh siswa, mewawancarai sumber informasi, mengamati kejadian di lapangan dan seterusnya. Apabila mereka telah mendapatkan data/informasi, mereka mengolahnya dengan mempergunakan kemampuan berfikir analitis dan kritis, serta mencoba mencari sendiri konsep dan generalisasi dari data mereka. Dengan ini fungsi guru berubah dari pemberi informasi menjadi pembimbing siswa, baik dalam mencari informasi, ataupun dalam mencari konsep dan generalisasi mereka. Kegiatan ini kemudian dilaporkan di kelas oleh siswa, baik secara sendiri maupun kelompok, mereka diskusikan dan perdebatkan di bawah bimbingan guru. Guru menjaga agar siswa dapat mencapai paling kurang konsep yang ingin dicari yang telah digariskan dalam kurikulum, bukan dengan memberitahukan konsep itu langsung kepada siswa. Armstrong (1980:212) mengemukakan ada beberapa langkah dasar dalam pendekatan ini yakni mengumpulkan data, menganalisa dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan konsep-konsep, menganalisa dan mengelompokkan konsep-konsep sehingga menghasilkan generalisasi, dan mengumpulkan informasi kembali untuk menguji kebenaran generalisasi.

Salah satu kritikan terhadap cara ini dari para guru adalah akan memakan waktu lama dan mungkin tidak akan mencapai target kurikulum. Jika guru masih berfikir dalam jumlah topik yang harus diberikan seperti selama ini keluhan itu ada benarnya. Tapi jika yang akan dibicarakan adalah konsep dan generalisasi, sedangkan konsep dan generalisasi itu adalah abstraksi dari fakta dan informasi, maka pendapat itu tentu tidak tepat. Jadi dengan demikian, di kelas guru tidak harus mengajarkan apalagi menerangkan peristiwa sejarah seperti Perang Diponegoro, Perang Paderi dan Perang Aceh, konsep kekerabatan Aceh atau Jawa secara terpisah, karena tugas itu dilakukan sendiri oleh siswa di luar kelas. Di kelas guru membimbing siswa mengabstraksikannya, menyederhanakannya, sehingga sampai kepada kesimpulan/ generalisasi tentang perlawanan terhadap penjajahan, menemukan

sendiri teori challenge and responsenya Toynebee, sampai pula kepada perlunya kerjasama dan saling ketergantungan satu sama lain. Yang dituju bukanlah jumlah pengetahuan (informasi) yang diperoleh, tetapi “learning how to learn,” bagaimana cara belajar, yakni cara mencari/menerima informasi, cara mengolah informasi dan cara mengambil kesimpulan, serta cara menyusun laporan/ mengemukakan pendapat dalam kertas kerja atau secara lisan, layaknya seorang peneliti kecil. Dengan demikian, jika siswa di sekolah telah dibiasakan melihat sesuatu secara kritis, ketika mereka terjun ke dalam alam nyata di masyarakat, mereka dapat menghadapi masalahnya secara tepat dengan kemampuan yang mereka peroleh di sekolah, mereka akan belajar sendiri.

Ada orang menyangsikan, apakah anak/siswa bisa melakukan hal itu, melihat kenyataan selama ini betapa pasifnya kebanyakan mahasiswa kita. Tetapi pengalaman kita menunjukkan, sebagaimana juga diperkuat oleh ahli psikologi, bahwa pada awalnya anak adalah peneliti. Bukankah pada awalnya, ketika sudah mulai mengerti dengan lingkungannya dan pandai bicara, seorang anak yang sehat akan selalu bertanya tentang apa yang ditemuinya; tapi sayangnya, karena faktor budaya, atau arogansi orang tua, keinginan ini tertahan dengan jawaban :”kamu masih kecil, kamu belum akan mengerti dan sebagainya.” Jika kebiasaan bertanya anak dipupuk, tentu lambat laun hal itu akan bertumbuh dengan baik dan dia akan menjadi orang yang mampu berfikir dalam arti yang sebenarnya.

Dengan cara begini pembelajaran dapat terjadi di luar ruang kelas yang diharapkan agar membuat siswa lebih aktif, sumber tidak tergantung hanya pada buku teks, dan sekolah pedalaman tak perlu kecil hati karena dia dapat mulai proses belajar dari lingkungannya sendiri. Ketika siswa beranjak meninggalkan desanya, pergi ke kota atau lingkungan yang lebih luas, dia dapat mengembangkan dan menguji konsep dan kesimpulan yang selama ini telah dimilikinya. Di kota mereka akan merasakan ketergantungan sebagai orang kota, tergantung pada tukang potong rumput dan tukang sampah, tergantung pada pedagang sayur keliling, tergantung pada kapal dan mobil dan sejenis ketergantungan lainnya. Di kota mereka dapat mengamati betapa kerjasama perlu dikembangkan, sebagaimana juga orang di desa bekerja sama dalam pembersihan jalan kampung, pembuatan dan pemeliharaan fasilitas publik dan kegiatan-kegiatan lainnya yang akan semakin memperkuat penghayatan mereka tentang perlunya kerjasama. Dengan pendekatan ini proses pembelajaran diharapkan tidak lagi bersifat indoktrinatif, suatu

kebenaran atau beberapa kebenaran dapat muncul, tergantung benarnya data dan alasan yang dikemukakan.

Kegiatan belajar kelompok dan diskusi di kelas akan memberikan kesempatan terlaksananya hidden curriculum, kurikulum tersembunyi untuk melatih dan membiasakan siswa bekerjasama, saling menghormati dan menghormati perbedaan pendapat, tidak mau menang sendiri dan seterusnya, kemampuan untuk memahami orang lain, dan secara diam-diam menumbuhkan rasa kesatuan dan ketergantungan satu sama lain.

Kompetensi yang perlu dimiliki guru adalah kemampuan membimbing siswa dalam penerapan proses inkuiri mereka. Terutama kemampuan membimbing siswa dalam pencarian data, pengolahan data dan cara mengambil kesimpulan. Di kelas guru harus dapat membimbing siswa melalui pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi (high level questioning) sehingga secara tak sadar siswa sampai kepada kesimpulan yang dikehendaki, menggunakan pendekatan induktif dalam berfikir.

Keberhasilan belajar ditentukan oleh evaluasi yang harus pula mendapat perhatian serius dan perlu mendapat perbaikan. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, selama ini evaluasi masih menekankan pada recalling of knowledge, penguasaan fakta atau ingatan terhadap hukum dan generalisasi, tidak menilai kemampuan berfikir kritis, memecahkan masalah, serta nilai dan sikap siswa. Cara ini selama ini telah memupuk budaya menerabas, istilah yang dipakai oleh Prof. Kuncaraningrat untuk menunjukkan sikap ingin cepat berhasil, walaupun dengan cara yang tidak benar. Di sekolah hal ini berwujud dalam mencuri waktu ujian, dan perbuatan curang lainnya. Untuk mengetahui kemampuan berfikir siswa dan kemampuannya memecahkan masalah, terutama masalah sosial, siswa harus dihadapkan kepada masalah (mungkin saja fiktif) dan diminta untuk menjawab pertanyaan yang problematik, mengemukakan alasan mengapa dia sampai pada jawaban atau kesimpulan yang dibuatnya. Misalnya, untuk siswa SMU, diberikan suatu deskripsi kebijakan dan diminta menilai apakah kebijakan tersebut benar atau tidak, dan mengapa dia menjawab demikian. Nilai dan sikap mereka dapat dilihat pada waktu mereka melakukan diskusi, bekerjasama mencari informasi dan kegiatan belajar lainnya, pergaulan di luar kelas dan kegiatan ekstra lainnya. Jika kita dapat mengubah cara penilaian, maka seperti dikemukakan Bruner, "examinations can also be allies in the battle to improve curricula and teaching."

Untuk memperkuat rasa persatuan sebagaimana judul dari makalah ini, beberapa konsep dasar/generalisasi perlu mendapat penekanan sebagai sesuatu yang harus ditemukan dan dihayati siswa dalam kegiatan belajar mereka. Di antaranya adalah:

1. individu/golongan mempunyai harga diri
2. setiap kelompok/masyarakat memiliki dan memerlukan tatakrama
3. setiap aksi akan menimbulkan reaksi
4. bersatu dalam perbedaan (bhinneka tunggal ika)
5. ketergantungan dan kebebasan
6. keseimbangan dalam alam dan masyarakat
7. kelebihan dan kekurangan
8. keterbatasan dan keinginan
9. lokasi dan potensi.

Konsep dan generalisasi di atas dapat diperkaya atau diubah sesuai dengan keperluan dan pengamatan dan dapat dilaksanakan secara integratif dalam bidang studi dan terpisah dalam mata pelajaran - mata pelajaran IPS. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa dengan konsep otonomi daerah tidaklah berarti bahwa mata pelajaran/ bidang studi IPS harus memusatkan pada kelebihan daerah masing-masing, misalnya kelebihan potensi, kelebihan adat istiadat sehingga seperti melecehkan kelompok/suku lain, mengajarkan bahasa daerah dan seterusnya yang bersifat kedaerahan, tetapi harusnya melihat keunikan dan kesamaannya dalam masyarakat bangsa. Kalau perlu melihat dan menyadari keunikan dan tempatnya dalam masyarakat dunia, mengingat pada masa yang akan datang kita telah menjadi warga dunia yang saling mempengaruhi.

Penutup.

Apa yang saya kemukakan adalah alternatif yang sebenarnya tidak baru sama sekali. Idenya sudah mulai diperkenalkan di Indonesia semenjak awal tahun tujuh puluhan, namun karena beberapa hal tidak berlanjut. Dengan cara yang sekarang ternyata kita belum berhasil. Ada baiknya kita meneruskan kembali ide yang dulu sudah muncul. Dengan cara ini kita dapat mengharapkan pendidikan sebagai agent of change, mengambil peran pendidikan ilmu sosial bagi persatuan bangsa, menjadi agen perubahan, walaupun kita menyadari bahwa ini saja tidak cukup sebagaimana dikemukakan dalam awal tulisan ini.

Bacaan

- Armstrong. David G. (1980). **The Social Studies in Secondary Education**. Macmillan Publishing Co.,Inc.New York.
- Bruner, J.S. (1963) **The Process of Education**.Vintage Books: New York.
- Fenton, Edwin.(1967). **The New Social Studies**. Holt,Rinehart and Winston, Inc. New York
- Silberman. C.E.(1971). **Crisis in the Classroom**. Vintage Books. New York.
- National Council for the Social Studies (1994). **Curriculum Standards for the Social Studies. Expectations of Excellence**. National Council for the Social Studies. Washington D.C.
- Depdikbud (1995) **Kurikulum Sekolah Menengah Umum. GBPP**. Depdikbud.Jakarta
- Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, (2001) **Buram Standar Nasional Kemampuan Dasar Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar, SLTP dan SMU**. Jakarta.(belum dipublikasikan)